

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

TEKS ASLI	TERJEMAHAN
<p>The rule of law and civil society are a modern historical construct; they are still in the process of construction on the basis of the new needs and demands of various societies and the political culture available in each tradition of thought. Apart from the advanced European and North American democratic regimes, large-scale, ongoing experiments are taking place in every contemporary society, such as China, India, Brazil, Mexico. Yet, there is no one recognized 'model' or archetype of a Civil Society with its correlated rule of law. One can even speak of the crisis of political reason in the most advanced experiments in the construction of a civil society such as those that are ongoing in United Kingdom, France, Holland and Scandinavia. On the other hand, there are societies in which political thought is paralyzed, dangerously diverted by a perverted and perverting instrumentalization of the religious tradition. This is the case in several of the so-called Islamic regimes or rather regimes which claim Islam to be the official religion of the state. To encompass all societies in which Islam is represented by a large majority or a minority of citizens, I prefer to use the expression 'Muslim contexts'. This enables Muslim minorities living in European and American societies to be included in the general exploration of the attitudes and approaches to civil societies that are more or less inspired by references to 'Islamic' principles, values and political vision. Surely, in all Muslim contexts, the issue is continuously and passionately debated in the ongoing political struggles</p>	<p>Negara Hukum dan masyarakat sipil adalah konstruksi sejarah modern; Mereka masih dalam proses pembangunan atas dasar kebutuhan dan tuntutan baru dari berbagai masyarakat dan budaya politik yang ada di setiap tradisi pemikiran. Terlepas dari rezim demokrasi Eropa dan Amerika Utara yang maju, eksperimen berskala besar yang sedang berlangsung sedang berlangsung di setiap masyarakat kontemporer, seperti Cina, India, Brasil, Meksiko. Namun, tidak ada yang mengenali 'model' atau Pola dasar Masyarakat Sipil dengan aturan hukum yang terkait. Seseorang bahkan dapat berbicara tentang krisis nalar politik dalam eksperimen paling maju di Pembangunan masyarakat sipil seperti yang sedang berlangsung di Inggris Raya, Prancis, Belanda, dan Skandinavia. Di sisi lain, ada Masyarakat di mana pemikiran politik dilumpuhkan, secara berbahaya dialihkan oleh instrumentalisasi tradisi keagamaan yang menyimpang dan menyimpang. Ini adalah kasus di beberapa yang disebut rezim Islam atau lebih tepatnya rezim yang mengklaim Islam sebagai agama resmi negara. Untuk mencakup semua masyarakat di mana Islam diwakili oleh mayoritas atau minoritas warga negara, saya lebih suka menggunakan Ekspresi 'konteks Muslim'. Ini memungkinkan minoritas Muslim tinggal Masyarakat Eropa dan Amerika untuk dimasukkan dalam eksplorasi umum Sikap dan pendekatan terhadap</p>

<p>between the established regimes and opposing movements in which opposition is tolerated. There are also many international conferences, seminars and political and religious meetings which provide opportunities for dialogue. These activities have an important educational role and should be systematically developed everywhere to fill the gaps where there is a deprivation and emptying of modern critical conceptualization of vital issues concerning the creation of a worldwide civic citizenship starting, of course, from various national experiences. I have personally insisted on the pedagogic necessity of liberating all nationalist collective imaginaries from the alienating ideological representation of so-called national or religious 'identities'. I have indicated the negative functions of the mythological identities built and taught in all national historiographies, including those of the already well-established modern democratic regimes. All the epistemological, intellectual, linguistic, political and legal obstacles that have been analyzed in the previous chapters continue to prevent and delay significant progress towards radical reassessments of the religious, legalistic and political legacy related to the 'great Islamic Tradition'. The concepts of secularized law and democratic culture are not only misunderstood and even totally ignored, and certainly strongly rejected by a large majority of Muslims, on the basis of what I called 'institutionalized ignorance'. The ideological competition between the two blocs constructed under the names of</p>	<p>masyarakat sipil yang kurang lebih terinspirasi olehnya Referensi untuk prinsip 'Islam', nilai dan visi politik. Tentunya, dalam semua konteks Muslim, masalah ini terus berlanjut dan bergairah Diperdebatkan dalam perjuangan politik yang sedang berlangsung antara rezim yang mapan dan Gerakan lawan di mana oposisi ditoleransi. Ada juga banyak Konferensi internasional, seminar dan pertemuan politik dan agama yang Memberikan kesempatan untuk berdialog. Kegiatan ini memiliki arti penting Peran pendidikan dan harus dikembangkan secara sistematis di mana-mana untuk mengisi Kesenjangan di mana ada perampasan dan pengosongan konseptualisasi kritis modern dari isu-isu penting mengenai penciptaan sipil sedunia Kewarganegaraan dimulai, tentu saja, dari berbagai pengalaman nasional. Saya secara pribadi menekankan perlunya pedagogis untuk membebaskan semua kaum nasionalis Imajinasi kolektif dari representasi ideologis yang mengasingkan yang disebut 'identitas' nasional atau agama. Saya telah menunjukkan fungsi negatif dari identitas mitologis yang dibangun dan diajarkan di semua historiografi nasional, Termasuk rezim demokrasi modern yang sudah mapan. Semua kendala epistemologis, intelektual, linguistik, politik dan hukum yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya terus mencegah dan menunda Kemajuan signifikan menuju penilaian ulang radikal dari agama,</p>
--	--

<p>'Islam' and the 'West' is increasingly distorting, disrupting and breaking down any positive experience that may be emerging in certain countries ruled by precarious political regimes. One of the most negative results of the mutual exclusion that has developed since 1945 by the negative polarization of 'Islam' and the 'West', is that both ideological poles instrumentalize a dualist, Manichaean thinking whenever they have to express their perception of each other. How is it possible to break free from these historical, cultural, intellectual impediments? There can be no political cooperation and positive communication as long as the basic political vocabulary is not available for both protagonists. I mention such simple and current words as democracy, rule of law, human rights, citizenship, justice, liberal philosophy, free market . . . Through translation – at least when it is accurate – ideas and representations can be transferred from one culture to another; but the concepts will remain abstract, cut off from their initial existential, historical content as long as the process of conceptualization has not become rooted, initiated by the historical experience that shapes the living collective memory of each social group, community or nation. This collective memory also needs to be expressed and transmitted in the original language used through all the historical experience of the group. This is not the case for the majority of marginalized groups and societies, since the modern secularized languages, developed in European societies from the seventeenth century</p>	<p>legalistik dan Warisan politik yang terkait dengan 'Tradisi Islam yang Agung'. Konsep hukum sekuler dan budaya demokrasi tidak hanya disalahpahami dan bahkan diabaikan sama sekali, dan tentunya ditolak keras oleh sebagian besar umat Islam, Atas dasar apa yang saya sebut 'ketidaktahuan yang dilembagakan'. Persaingan ideologis antara dua blok yang dibangun dengan nama 'Islam' dan 'Barat' semakin mendistorsi, mengganggu dan menghancurkan hal-hal positif. Pengalaman yang mungkin muncul di negara-negara tertentu yang diperintah oleh rezim politik yang berbahaya.</p> <p>Salah satu hasil paling negatif dari saling mengucilkan yang telah berkembang Sejak 1945 oleh polarisasi negatif 'Islam' dan 'Barat', adalah keduanya Kutub ideologis berperan sebagai dualis, pemikiran Manichaean setiap kali mereka Harus mengekspresikan persepsi mereka satu sama lain. Bagaimana mungkin untuk membebaskan diri Dari hambatan historis, budaya, intelektual ini? Tidak mungkin ada Kerjasama politik dan komunikasi positif selama politik dasar Kosa kata tidak tersedia untuk kedua protagonis. Saya sebutkan sederhana dan Kata-kata saat ini sebagai demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, kewarganegaraan, keadilan, Filsafat liberal, pasar bebas. . . Melalui terjemahan - setidaknya saat itu Akurat - ide dan representasi dapat ditransfer dari satu budaya ke Lain; Tetapi konsepnya akan tetap abstrak, terputus dari awalnya Eksistensial, konten historis selama</p>
--	---

<p>onwards, were spread all over the world during colonial expansion, followed by the increasing pressures of the ideology of development/ underdevelopment and now by globalization with its constraining economic, monetary and technological rule</p>	<p>proses konseptualisasi Tidak berakar, diprakarsai oleh pengalaman sejarah yang membentuk kehidupan Memori kolektif dari setiap kelompok sosial, komunitas atau bangsa. Kolektif ini Memori juga perlu diungkapkan dan ditransmisikan dalam bahasa aslinya Digunakan melalui semua pengalaman sejarah grup. Ini bukan kasusnya Mayoritas kelompok dan masyarakat yang terpinggirkan, sejak bahasa sekuler modern, yang berkembang di masyarakat Eropa sejak abad ketujuh belas dan seterusnya, tersebar di seluruh dunia selama ekspansi kolonial, diikuti oleh meningkatnya tekanan ideologi pembangunan / keterbelakangan dan sekarang oleh globalisasi dengan aturan ekonomi, moneter dan teknologinya yang membatasi.</p>
<p>One of the most negative results of the mutual exclusion that has developed since 1945 by the negative polarization of 'Islam' and the 'West', is that both ideological poles instrumentalize a dualist, Manichaean thinking whenever they have to express their perception of each other. How is it possible to break free from these historical, cultural, intellectual impediments? There can be no political cooperation and positive communication as long as the basic political vocabulary is not available for both protagonists. I mention such simple and current words as democracy, rule of law, human rights, citizenship, justice, liberal philosophy, free market . . . Through</p>	<p>Salah satu hasil paling negatif dari saling mengucilkan yang telah dikembangkan sejak 1945 oleh polarisasi negatif 'Islam' dan 'Barat', adalah bahwa kedua kutub ideologis tersebut berperan sebagai dualis, pemikiran Manichaean setiap kali mereka Harus mengekspresikan persepsi mereka satu sama lain. Bagaimana mungkin untuk membebaskan diri dari hambatan historis, budaya, intelektual ini? Tidak ada kerja sama politik dan komunikasi positif selama politik dasarnya Kosa kata tidak tersedia untuk kedua protagonis. Saya menyebutkan kata-kata sederhana dan terkini seperti demokrasi, supremasi hukum, hak</p>

<p>translation – at least when it is accurate – ideas and representations can be transferred from one culture to another; but the concepts will remain abstract, cut off from their initial existential, historical content as long as the process of conceptualization has not become rooted, initiated by the historical experience that shapes the living collective memory of each social group, community or nation.</p>	<p>asasi manusia, kewarganegaraan, keadilan, filsafat liberal, pasar bebas. . . Melalui terjemahan - setidaknya jika akurat - ide dan representasi dapat ditransfer dari satu budaya ke budaya lain; Tetapi konsep-konsep tersebut akan tetap abstrak, terputus dari eksistensial awal, isi sejarah selama proses konseptualisasi belum berakar, yang diprakarsai oleh pengalaman sejarah yang membentuk kehidupan. Memori kolektif dari setiap kelompok sosial, komunitas atau bangsa.</p>
<p>How can the rule of law and civil society be located within political and religious culture using the thought processes claimed by contemporary Muslims as the ultimate legal instance of authority on which an 'authentic' Islamic governance should be exclusively based? Those who defend this position minimize, ignore or even reject a fruitful dialogue, and refuse to identify any reliable, universal model leading to garnering legitimacy for the planned civil society. They constantly point out to failures, deviations, perverted ideologies and unfulfilled promises of all the existing models experienced in several democratic regimes. The historical experiences of Europe and North America societies offer the possibility of detecting the solid, sustainable elements of a dynamic civil society. One example is the very successful French law of freedom of association promulgated in 1901. This also makes it possible to falsify – according to Karl Popper's definition of falsification – theoretical visions based on purely ideological options in Muslim contexts. This is the only way out of the recurrent conflicts about religious and secularized models, Oriental and</p>	<p>Bagaimana supremasi hukum dan masyarakat sipil ditempatkan dalam budaya politik dan agama menggunakan proses pemikiran yang diklaim oleh kontemporer Muslim sebagai contoh hukum tertinggi dari otoritas di mana pemerintahan Islam 'otentik' harus didasarkan secara eksklusif? Mereka yang mempertahankan ini Posisi meminimalkan, mengabaikan atau bahkan menolak dialog yang bermanfaat, dan menolak untuk mengidentifikasi model universal yang dapat diandalkan yang mengarah pada pengumpulan legitimasi bagi masyarakat sipil yang direncanakan. Mereka terus-menerus menunjukkan kegagalan, penyimpangan, ideologi yang menyimpang, dan janji-janji yang tidak terpenuhi dari semua model yang ada. Dialami di beberapa rezim demokrasi. Pengalaman sejarah masyarakat Eropa dan Amerika Utara menawarkan kemungkinan untuk mendeteksi unsur-unsur yang solid dan berkelanjutan dari masyarakat sipil yang dinamis. Salah satu contohnya adalah hukum kebebasan</p>

<p>Western ‘values’, the universal and the local outreach of human rights, etc. For this search, the ‘light’ of both Euro-American and Muslim post-colonial experiences might be helpful on condition that both are approached through a radical criticism. The failures of post-colonial states to foster a democratic civil society should be clearly identified with their actual internal genesis and external contexts. Describing the opposition of fundamentalist defenders of a so-called ‘Islamic model of state’ to the existing regimes accused of introducing Western secularized norms and institutions is insufficient. In fact, all states in all countries have more or less used and imposed Islamic references and a will to protect the shari‘a; there is a mimic rivalry between the state and the opposition, to outdo each other in closeness to the ‘authentic’, ‘pure’ and ‘original’ teachings of the Qur‘an and the Prophet. This debate on old theological, exegetic and legal issues unknown historically to both protagonists, has overwhelmingly occupied the political space and eliminated the intellectual and scientific endeavours to trace a clearcut line between the ideological, instrumentalized so-called Islam, and two other problems neglected and maintained in the unthinkable and the unthought: the historical, doctrinal Islam, according to the critical studies published since the last nineties (see the bibliography) on the one side; and the crucial new debates enlarged and enriched by the current experiences of the European Community, in particular, on the other.</p>	<p>berserikat Prancis yang sangat sukses yang diundangkan pada tahun 1901. Hal ini juga memungkinkan pemalsuan - menurut definisi Karl Popper tentang Pemalsuan - pandangan teoritis yang didasarkan pada pilihan ideologis murni dalam konteks Muslim. Ini adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik yang berulang tentang Model religius dan sekuler, 'nilai-nilai' Oriental dan Barat, jangkauan universal dan lokal hak asasi manusia, dll. Untuk pencarian ini, 'cahaya' dari pengalaman pasca-kolonial Eropa-Amerika dan Muslim mungkin bisa membantu Kondisi yang keduanya didekati melalui kritik radikal. Kegagalan negara-negara pasca-kolonial untuk membina masyarakat sipil yang demokratis harus secara jelas diidentifikasi dengan asal-usul internal aktual dan konteks eksternal mereka. Mendeskripsikan penentangan para pembela fundamentalis dari apa yang disebut 'model negara Islam' terhadap rezim yang ada yang dituduh memperkenalkan norma dan institusi sekuler Barat tidaklah cukup. Faktanya, semua negara bagian di semua negara telah sedikit banyak menggunakan dan memberlakukan referensi Islam dan keinginan untuk melindungi syariah; Ada persaingan meniru antara negara dan oposisi, untuk mengalahkan satu sama lain dalam kedekatan dengan ajaran 'otentik', 'murni' dan 'asli' dari Al-Qur'an dan Nabi. Perdebatan tentang masalah-masalah teologis, eksegetik, dan hukum lama yang tidak diketahui secara historis oleh kedua protagonis ini, telah sangat menempati ruang politik dan menghilangkan upaya intelektual dan ilmiah untuk melacak</p>
---	--

	<p>garis yang jelas antara ideologis, yang disebut Islam, dan dua masalah lain yang diabaikan dan Dipertahankan dalam tak terpikirkan dan tidak terpikirkan: Islam historis, doktrinal, menurut kajian kritis yang diterbitkan sejak tahun sembilan puluhan terakhir (lihat daftar pustaka) di satu sisi; Dan perdebatan baru yang krusial diperbesar dan diperkaya oleh pengalaman terkini Komunitas Eropa, khususnya, di sisi lain.</p> <p>Pengalaman sejarah masyarakat Eropa dan Amerika Utara menawarkan kemungkinan untuk mendeteksi unsur-unsur yang solid dan berkelanjutan dari masyarakat sipil yang dinamis. Salah satu contohnya adalah hukum kebebasan berserikat Prancis yang sangat sukses yang diundangkan pada tahun 1901. Hal ini juga memungkinkan untuk memalsukan - menurut definisi pemalsuan Karl Popper - visi teoretis yang didasarkan pada pilihan ideologis murni dalam konteks Muslim. Ini adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik yang berulang tentang model religius dan sekuler, 'nilai-nilai' Oriental dan Barat, jangkauan universal dan lokal hak asasi manusia, dll. Untuk pencarian ini, 'cahaya' dari Euro-Amerika dan Muslim Pengalaman pasca-kolonial mungkin dapat membantu dengan syarat bahwa keduanya didekati melalui kritik radikal. Kegagalan negara-negara pasca-kolonial untuk membina masyarakat sipil yang demokratis harus secara jelas diidentifikasi dengan asal-usul internal aktual dan konteks eksternal mereka. Mendeskripsikan penentangan para pembela fundamentalis dari apa yang disebut</p>
--	--

protect the shari'a; there is a mimic rivalry between the state and the opposition, to outdo each other in closeness to the 'authentic', 'pure' and 'original' teachings of the Qur'an and the Prophet.

'model negara Islam' terhadap rezim yang ada yang dituduh memperkenalkan norma dan institusi sekuler Barat tidaklah cukup. Faktanya, semua negara bagian di semua negara telah sedikit banyak menggunakan dan memberlakukan referensi Islam dan keinginan untuk melindungi syariah; Ada persaingan meniru antara negara dan oposisi, untuk mengalahkan satu sama lain dalam kedekatan dengan ajaran 'otentik', 'murni' dan 'asli' dari Al-Qur'an dan Nabi.

The concept of worldwide space of solidarity and citizenship is not considered in the diplomatic discourse and geopolitical strategies of any contemporary state, especially the Western democratic states who are rather developing theories of clashes, threats of fanaticism, violence, terrorism, Islamist/Islamic movements against 'Western values and civilization'. This Manichean dualist frame of the present geopolitical struggle is becoming the main obstacle for a serious consideration of the building process of a worldwide space of solidarity and citizenship. Mindful of all these observations, we shall explore three issues which, in my view, have prior relevance to the necessity of moving from a diplomacy of national interests and hegemony to a new vision of history based on two harmonized principles: the protection of specific national cultural rights, and the commitment to a common effort to reach a worldwide space of solidarity and citizenship.

Konsep ruang solidaritas dan Kewarganegaraan tidak dipertimbangkan dalam wacana diplomatik dan strategi geopolitik negara kontemporer mana pun, terutama negara demokrasi Barat yang agak mengembangkan teori bentsrokan, ancaman fanatisme, kekerasan, terorisme, gerakan Islamis / Islam melawan 'nilai-nilai dan peradaban Barat'. Kerangka dualis Manichean dari perjuangan geopolitik saat ini menjadi hambatan utama untuk pertimbangan serius proses pembangunan ruang solidaritas dan kewarganegaraan dunia.

Memperhatikan semua pengamatan ini, kita akan mengeksplorasi tiga masalah yang, menurut pandangan saya, memiliki relevansi sebelumnya dengan perlunya berpindah dari diplomasi kepentingan nasional dan hegemoni ke visi baru sejarah berdasarkan dua prinsip yang selaras: perlindungan nasional tertentu. Hak budaya, dan komitmen pada upaya bersama untuk mencapai ruang solidaritas di seluruh dunia

<p>This dichotomy is the product of history; developed by religions claiming the monopoly on Truth as a whole: the truth of beliefs and non-beliefs, the truth of the Just Law, the truth of the answers to all questions in the universe, physical phenomena, terrestrial history and the history of salvation, life and death, human nature and activities, etc. Reason, imagination and memory are associated in the articulation, the transmission and the protection of the Truth, from deviations, destruction and negation. All these definitions and strategies that deliver, explain, teach, apply and protect the Truth can be called the 'religious regime of Truth'. Premodern states have adopted, supported and utilized this 'regime of Truth' as the ultimate instance of their legitimacy; the 'managers of the sacred' (priests, rabbis, imams, wise men) and the secular rulers agreeing to respectively share their responsibilities B religion being the instance of authority, the state, the instance of power B to implement, serve and protect the Truth to which the head of state himself submits as a human being. The alliance between religion and politics has generated a dogmatic control on all levels of the 'subjects' life and expression, submitted to the religious law itself as mediated by the ruler and his delegates.</p>	<p>dan kewarganegaraan.</p> <p>Dikotomi ini adalah produk sejarah; Dikembangkan oleh agama-agama yang mengklaim monopoli Kebenaran secara keseluruhan: kebenaran kepercayaan dan non-kepercayaan, kebenaran Hukum Adil, kebenaran jawaban atas semua pertanyaan di alam semesta, fenomena fisik, sejarah terestrial dan sejarah keselamatan, hidup dan mati, sifat dan aktivitas manusia, dll. Akal, imajinasi dan ingatan adalah Terkait dalam artikulasi, transmisi dan perlindungan Kebenaran, dari penyimpangan, perusakan dan penyangkalan. Semua definisi dan strategi yang menyampaikan, menjelaskan, mengajar, menerapkan, dan melindungi Kebenaran ini dapat disebut 'rezim agama Kebenaran'. Negara-negara pramodern telah mengadopsi, mendukung, dan memanfaatkan 'rezim Kebenaran' ini sebagai contoh terakhir dari legitimasi mereka; Para 'pengelola yang sakral' (pendeta, rabi, imam, orang bijak) dan penguasa sekuler setuju untuk masing-masing berbagi tanggung jawab mereka. Agama B sebagai contoh otoritas, negara, contoh kekuasaan B untuk melaksanakan, melayani dan melindungi Kebenaran yang diajukan oleh kepala negara sebagai manusia. Aliansi antara agama dan politik telah menghasilkan kontrol dogmatis pada semua tingkat kehidupan dan ekspresi 'subjek', yang tunduk pada hukum agama itu sendiri. Sebagaimana dimediasi oleh penguasa dan utusannya.</p>
---	---

Modern revolutions have substituted their own ‘regimes of Truth’ to the religious ones, which are still claiming full validity against the most constraining scientific evidence established by linguistics, critical history, cultural anthropology, psychology, historical epistemology, etc. Scientific arguments cannot remove religious Truth once rooted in the human subject; it can be transformed, focused on different ‘values’, activities, but the ‘ethics of conviction’ continue to determine the perception, interpretation and motivation of each person. This construction of the subject needs to be better studied along with the scientific knowledge, used as a mere expertise and technical reproduction, which superficially affects the deep psychological, emotional structure of the individual’s life. For this purpose the French Revolution is a rich case study: it was particularly violent and radical in its will to overthrow the ‘old Regime’ and a king invested with the divine Right as sacralized by the Church at Reims. When Louis XVI had been judged and executed by the courts in the name of the sovereignty of the people, the sacralizing power of the divine Right was finally abolished. When Khomeini came to power in February 1979, he did just the opposite of what the French revolutionaries imposed: he decided to arrest the Shah, presenting him as Fir‘aun, the Qur’anic symbol of the unjust ruler who usurped the right of the charismatic guide to enforce God’s law on earth. That way the Shah could be arrested, judged and executed in the name of God as represented by the Imam.

Revolusi modern telah menggantikan ‘rezim Kebenaran’ mereka sendiri dengan yang religius, yang masih mengklaim validitas penuh terhadap bukti ilmiah paling membatasi yang ditetapkan oleh linguistik, sejarah kritis, antropologi budaya, psikologi, epistemologi sejarah, dll. Argumen ilmiah tidak dapat menghapus agama Kebenaran pernah berakar pada subjek manusia; Itu dapat diubah, difokuskan pada ‘nilai-nilai’, aktivitas yang berbeda, tetapi ‘etika keyakinan’ terus menentukan persepsi, interpretasi dan motivasi setiap orang. Konstruksi subjek ini perlu dipelajari lebih baik bersama dengan pengetahuan ilmiah, digunakan sebagai keahlian dan reproduksi teknis belaka, yang secara dangkal mempengaruhi psikologis, struktur emosional yang mendalam dari kehidupan individu. Untuk tujuan ini, Revolusi Prancis adalah studi kasus yang kaya: ia sangat keras dan radikal dalam keinginannya untuk menggulingkan ‘Rezim lama’ dan seorang raja yang diinvestasikan dengan Hak ilahi seperti yang disakralkan oleh Gereja di Reims. Ketika Louis XVI diadili dan dieksekusi oleh pengadilan atas nama kedaulatan rakyat, kekuasaan sakralisasi Hak ilahi akhirnya dihapuskan. Ketika Khomeini berkuasa pada Februari 1979, dia melakukan kebalikan dari apa yang dipaksakan oleh kaum revolusioner Prancis: dia memutuskan untuk menangkap Shah, menampilkannya sebagai Fir'aun, simbol Alquran dari penguasa yang tidak adil yang merebut hak rakyat. Panduan karismatik untuk menegakkan hukum Tuhan di bumi. Dengan begitu Syah

	<p>bisa ditangkap, diadili dan dieksekusi atas nama Tuhan sebagaimana diwakili oleh Imam.</p> <p>Dengan kata lain, jika kita mempertimbangkan kasus konteks Islam, kita perlu menelaah kembali dari Awal prinsip yang diterima oleh mayoritas Muslim, yang menurutnya Islam secara bersamaan adalah agama, negara dan masyarakat, tiga 'D's - DIn, Dawla, Dunya – sering tak terpisahkan Dibahas dalam pemikiran Islam klasik. Negara hukum dan masyarakat sipil adalah hasil dari modern Konseptualisasi, berdasarkan asas hukum dan kelembagaan pemisahan atau otonomi Bidang keagamaan dengan spekulasi teologisnya yang spesifik tentang nilai-nilai spiritual dan etika, dan Lingkungan politik dengan pendekatan filosofis sekuler terhadap pemerintahan, legitimasi, populer Kedaulatan, hukum positif dan pemisahan tiga instansi yang dikenal sebagai kekuasaan legislatif, Kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman. Dalam konsep modern tentang legitimasi politik, Tuhan Dan Wahyu, otoritas kenabian tidak lagi menjadi sumber Pengetahuan Sejati, Hukum yang Adil, Nilai spiritual dan etika tertinggi; Semua jenis dan tingkatan yang disebut nilai.</p>
<p>Muslim supporters of the reformation movement (islah) that began in the nineteenth century and lasted until 1940, had an apologetic, naïve answer to this question. They claimed that regression back to the 'authentic' Islam taught by God and his Messenger started with the opulent, materialistic, secular</p>	<p>Para pendukung Muslim dari gerakan reformasi (islah) yang dimulai pada abad kesembilan belas dan berlangsung hingga 1940, memiliki jawaban yang naif dan menyesal atas pertanyaan ini. Mereka mengklaim bahwa kemunduran kembali ke Islam 'otentik' yang diajarkan oleh Tuhan</p>

<p>civilization that prevailed under several dynasties and contemporary regimes. Muslims went astray and deviated from the ideal Righteous, God-given Rule which can be recovered and restored by learned, pious, reliable authorities ... this genuine mythologization of the mythical structured message of the Prophetic Discourse was defended as an answer that challenged modernity and would be replaced after 1945, by the nationalist, secular ideology of liberation. The transition from islah to the so-called socialist revolution lasted until the late 1970s, when the political failure of the post-colonial regimes with a single-party system opened the way to a fundamentalist Islamic solution, or radical Islam.</p>	<p>dan Rasul-Nya dimulai dengan peradaban mewah, materialistik, sekuler yang berlaku di bawah beberapa dinasti dan rezim kontemporer. Muslim tersesat dan menyimpang dari Adil yang ideal, Aturan yang diberikan Tuhan yang dapat dipulihkan dan dipulihkan oleh otoritas terpelajar, saleh, dan dapat diandalkan ... mitologi asli dari pesan terstruktur mitos dari Wacana Nabi dipertahankan sebagai jawaban yang menantang modernitas dan akan Diganti setelah 1945, oleh nasionalis, ideologi pembebasan sekuler. Transisi dari islah ke apa yang disebut revolusi sosialis berlangsung hingga akhir 1970-an, ketika kegagalan politik rezim pasca-kolonial dengan sistem partai tunggal membuka jalan menuju solusi Islam fundamentalis, atau Islam radikal.</p>
<p>In the present crises of all regimes of truth and inherited systems of legitimization, the new waves of 'believers' are happy with 'the return of religion' as a platform of resistance to the 'materialist', secular, corrupted, corrupting regimes; but they are unable to rethink the new status and functions of this religion manipulated, in fact, by politically oriented and obscurantist 'leaders'. In European contexts, the social sciences provide more reliable approaches to the religious phenomenon and its traditional and contemporary expressions. At the same time, the secular regime of truth is revisited and reinterpreted in the wider perspectives and the new cognitive frameworks offered by the combined revolutionary discoveries of</p>	<p>Dalam krisis saat ini dari semua rezim kebenaran dan sistem legitimasi yang diwariskan, gelombang baru 'orang percaya' senang dengan 'kembalinya agama' Sebagai platform perlawanan terhadap rezim 'materialis', sekuler, korup, dan korup; Tetapi mereka tidak dapat memikirkan kembali status dan fungsi baru dari agama ini yang dimanipulasi, pada kenyataannya, oleh 'pemimpin' yang berorientasi politik dan tidak jelas. Dalam konteks Eropa, ilmu sosial memberikan pendekatan yang lebih andal terhadap fenomena agama dan ekspresi tradisional dan kontempornernya. Pada saat yang sama, rezim kebenaran sekuler ditinjau kembali dan ditafsirkan kembali Perspektif yang lebih luas dan kerangka kognitif baru yang</p>

<p>social, information and hard sciences. The intellectual and philosophical follow-ups of the technological leaps with their impact on contemporary societies as well as on the formation of the new human subject, is obviously not in the line and on the level of the hopes, demands and repressed needs of various populations and social classes. We see, rather, a growing fear and anger in the face of so many forms of violence generated by the powerful and obscure forces of globalization. As far as Islam and societies referring to it are concerned, acts of terrorism and physical violence in the name of a so-called Islamic Revolution, have replaced the reformist discourse (islah) in reactivating the so-called ‘authentic Islam’ bequeathed by the pious pure sanctified Ancestors, al-salaf as-salih. Examples of this structural move are provided in several contemporary Islamic contexts. The social, political, cultural and economic conditions to generate or negate the emergence of a modern peaceful civil society, are changing as a result of tragic murders and ideological pressures. The search for a more concrete, effective, liberating interaction between thought, knowledge and action is again delayed and distorted, if not deleted by uncontrolled, invisible forces. Obviously, these forces are not only opposed to the orientation I am proposing, but the majority of social actors are prevented by political, social, economic, cultural impediments from even thinking of the possibility to take the initiatives precisely required to get out of their present impasse. Demographic pressure, unemployment, social marginalization, material, psychological and sexual frustrations, precarious conditions of</p>	<p>ditawarkan oleh gabungan penemuan-penemuan revolusioner dari ilmu sosial, informasi, dan ilmu keras. Tindak lanjut intelektual dan filosofis dari lompatan teknologi dengan dampaknya pada masyarakat kontemporer serta pada pembentukan subjek manusia baru, jelas tidak sejalan dan pada tingkat harapan, tuntutan, dan kebutuhan yang ditekan dari berbagai populasi. Dan kelas sosial. Sebaliknya, kita melihat meningkatnya ketakutan dan kemarahan dalam menghadapi begitu banyak bentuk kekerasan. Yang dihasilkan oleh kekuatan globalisasi yang kuat dan tidak jelas. Sejauh menyangkut Islam dan masyarakat yang dirujuk, tindakan terorisme dan kekerasan fisik atas nama yang disebut Revolusi Islam, telah menggantikan Wacana reformis (islah) dalam mengaktifkan kembali apa yang disebut ‘Islam otentik’ yang diwariskan oleh leluhur suci suci yang saleh, al-salaf as-salih. Contoh gerakan struktural ini diberikan dalam beberapa konteks Islam kontemporer. Itu Kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi untuk membangkitkan atau meniadakan munculnya masyarakat sipil modern yang damai, berubah sebagai akibat dari pembunuhan tragis dan tekanan ideologis. Pencarian interaksi yang lebih konkret, efektif, dan membebaskan antara pikiran, pengetahuan, dan tindakan sekali lagi tertunda dan terdistorsi, jika tidak dihapus oleh kekuatan tak terlihat yang tidak terkendali. Jelas sekali, ini Kekuatan tidak hanya berlawanan dengan orientasi yang saya usulkan, tetapi mayoritas aktor sosial dicegah oleh politik, sosial, ekonomi, budaya.</p>
---	---

<p>daily life, authoritarian distant state, inefficient bureaucracy, irrelevant system of education, disintegration of cultural, ethical and semantic codes, uncertain future and populist religious expressions. These are themes for sociological analysis to show how problematic and, indeed, almost impossible is the emergence of a civil society with all its attributes, institutions and functions.</p>	<p>Halangan bahkan dari memikirkan kemungkinan untuk mengambil inisiatif yang dibutuhkan secara tepat untuk keluar dari kebuntuan mereka saat ini. Tekanan demografis, Pengangguran, marginalisasi sosial, material, frustrasi psikologis dan seksual, kondisi kehidupan sehari-hari yang genting, negara yang jauh otoriter, birokrasi yang tidak efisien, sistem pendidikan yang tidak relevan, disintegrasi kode budaya, etika dan semantik, masa depan yang tidak pasti, dan ekspresi keagamaan populis. Inilah tema-tema analisis sosiologis untuk menunjukkan betapa problematisnya dan bahkan hampir tidak mungkin munculnya masyarakat sipil dengan segala atribut, kelembagaan dan fungsinya.</p>
<p>We can already make the following statement as regards the disputed issue of the separation between Mosque and State as institutional entities. A brutal separation along the lines of that used by Kemal Atatürk to eradicate Ottoman institutions, cannot be on the political agenda of any party in power as long as the state ultimately remains patrimonial and the social mentalities are deeply shaped and commanded by patriarchal kinship mechanisms. I have observed these common features in all the Muslim countries in which I have lectured from Indonesia to Morocco, from the Caucasus to South Africa. Systematic ethno-linguistic surveys of all contemporary Islamic contexts would show how gender segregation is reflected in the separation of private and public space, in the division of daily work, in the vertical power of the father or the elder brother, in the culture transmitted by the mother to her</p>	<p>Kita sudah bisa membuat pernyataan berikut sehubungan dengan sengketa masalah pemisahan Masjid dan Negara sebagai entitas kelembagaan. Pemisahan brutal di sepanjang garis yang digunakan oleh Kemal Atatürk untuk memberantas institusi Ottoman, tidak dapat menjadi agenda politik partai mana pun yang berkuasa selama negara pada akhirnya tetap patrimonial dan mentalitas sosial sangat dibentuk dan diperintahkan oleh kekerabatan patriarkal. Mekanisme. Saya telah mengamati ciri-ciri umum ini di semua negara Muslim tempat saya mengajar dari Indonesia hingga Maroko, dari Kaukasus ke Afrika Selatan. Survei etno-linguistik sistematis dari semua konteks Islam kontemporer akan menunjukkan bagaimana segregasi gender tercermin dalam pemisahan ruang privat dan publik, dalam pembagian pekerjaan sehari-hari, dalam kekuasaan vertikal ayah atau</p>

daughters, the father to the males. When rural or nomadic populations are uprooted and move to the slums surrounding the overpopulated cities, the patriarchal order breaks down, to be replaced by a specific populist system of inner solidarity and outer hostility which deserves the special attention of sociologists. A rampant secularization permeates these emerging micro-societies through the media, but the intellectual and cultural dimensions of what we call secularism in Western contexts – more specifically in Western Europe – are as absent and unthinkable as they are in the upper, wealthier classes in whom material modernisation is too often combined with cultural traditionalization. Under such socio-cultural and anthropological conditions, asking for a separation of Mosque and state is just imposing a foreign formal ideological model on societies in which the problem of increasing structural violence, reflected in the architecture and urban fabric, is not addressed either by the patrimonial states, nor by the ‘élites’ obliged to negotiate their conditional freedom with the powerful bureaucracy or levels of power at the service of the established regime.

The issue of religion, ethics and rule of law deserves further clarification.

This is exactly what happened historically in the development of Islamic thought. After the death of Ibn

orang tua yang mengganggu, dalam budaya yang ditransmisikan oleh Ibu untuk putrinya, ayah untuk laki-laki. Saat pedesaan atau nomaden Populasi tercerabut dan pindah ke daerah kumuh di sekitar kota-kota padat penduduk, tatanan patriarki rusak, untuk digantikan oleh a Sistem kerakyatan tertentu dari solidaritas batin dan permusuhan luar yang patut mendapat perhatian khusus dari sosiolog. Sekularisasi yang merajalela meresap ke dalam masyarakat mikro yang muncul ini melalui media, tetapi melalui intelektual dan budaya Dimensi dari apa yang kita sebut sekularisme dalam konteks Barat - lebih khusus lagi di Eropa Barat - sama absen dan tidak terpikirkannya seperti kelas atas dan lebih kaya di mana modernisasi material terlalu sering digabungkan dengan tradisionalisasi budaya. Dalam kondisi sosio-kultural dan antropologis seperti itu, meminta pemisahan Masjid dan negara hanyalah memaksakan model ideologis formal asing pada masyarakat di mana masalah meningkatnya kekerasan struktural, yang tercermin dalam arsitektur dan tatanan perkotaan, tidak ditangani baik oleh pihak Negara patrimonial, atau oleh 'elit' yang diwajibkan untuk menegosiasikan kebebasan bersyarat mereka dengan birokrasi yang kuat atau tingkat Kekuasaan untuk melayani rezim yang mapan. Masalah agama, etika dan supremasi hukum membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

Inilah yang sebenarnya terjadi secara historis dalam perkembangan pemikiran Islam. Setelah kematian

<p>Rushd (1198), the creative interface between theology, religious law and philosophy was disrupted; theology as a rationalizing attempt at faith building or even criticism, disappeared after the thirteenth–fourteenth centuries; schools of law stopped their disputations (munazara) and became isolated from each other; ethics elevated by Miskawayh (1020) to the rank of a key discipline in the curriculum of a learned humanist human subject, was disregarded as well as a critical, rationalizing endeavour to consciously discern the positive, operative, emancipating virtues from the traditional, uncriticized, unthought collective habits ritually reproduced in patriarchal societies. We cannot ignore this historical transformation of the intellectual scene in all Islamic contexts from around 1300 to 1850. The second radical transformation of intellectual activity concerning all the issues related to the three 'D's, began after 1945 and is still in progress. All so-called Muslim societies have been challenged by the modern intellectual, institutional shift that occurred in Europe during the seventeenth and eighteenth centuries, but they had to be cautious and finally reject a historical experience introduced from the outside under colonial domination. There is an urgent need to rewrite the whole history of the colonial phenomenon, bearing in mind the important distinction between the local traditional cultures of the colonized countries and the colonial, ideological translation, in the nineteenth century, of intellectual modernity by Europeans themselves for their own peasant population and industrial workers. The colonized societies were actually based</p>	<p>Ibn Rusyd (1198), antarmuka kreatif antara Teologi, hukum agama dan filsafat terganggu; Teologi sebagai upaya rasionalisasi untuk membangun iman atau bahkan kritik, menghilang setelah abad ketiga belas-keempat belas; Sekolah hukum menghentikan perselisihan mereka (munazara) dan menjadi terisolasi satu sama lain; Etika yang diangkat oleh Miskawayh (1020) ke peringkat disiplin utama dalam kurikulum subjek manusia humanis terpelajar, diabaikan serta upaya kritis dan rasionalisasi untuk secara sadar membedakan kebijakan positif, operatif, emansipasi dari Kebiasaan kolektif yang tradisional, tidak dikritik, dan tidak terpikirkan secara ritual direproduksi dalam masyarakat patriarkal. Kita tidak dapat mengabaikan transformasi historis dari kancah intelektual ini dalam semua konteks Islam dari sekitar tahun 1300 hingga 1850. Transformasi radikal kedua dari aktivitas intelektual mengenai semua masalah yang terkait dengan tiga 'D', dimulai setelah 1945 dan masih berlangsung. Semua yang disebut Muslim Masyarakat telah ditantang oleh intelektual modern, pergeseran kelembagaan yang terjadi di Eropa selama abad ketujuh belas dan kedelapan belas, tetapi mereka harus berhati-hati dan akhirnya menolak pengalaman sejarah yang diperkenalkan dari luar di bawah dominasi kolonial. Ada kebutuhan mendesak untuk menulis ulang seluruh sejarah fenomena kolonial, dengan mengingat perbedaan penting antara budaya tradisional lokal negara-negara terjajah dan terjemahan ideologis kolonial, pada abad kesembilan belas, modernitas</p>
--	---

on the patriarchal system more than on Islamic Law and ethics. That is why I prefer to speak of Islamic contexts, or the so-called Muslim society in order to escape from the ideological confusions spread throughout the contemporary world by Muslim discourses ‘objectively’ (I mean by that, without any deconstructive criticism) transcribed, reported by the media and even a great number of well known scholars. Highly respected and influential Muslim personalities and leaders refer with pride and conviction to the intangible superseding Islamic spirituality and Ethics, without taking into consideration all that I have just mentioned about the historical, sociological and ideological transformations inside Islamic thought itself on one hand and the undisputable challenge of modernity as a mental, historical shift, on the other. Such positions based on personal belief, or constraining responsibilities for those in charge of religious, political and educational leadership, contribute to maintaining the ideological, apologetic confusions and, as a result, delay the inevitable radical criticism of values – whether spiritual or ethical – introduced by Nietzsche in his Genealogy of Values. Because this criticism is ignored and unthinkable, of course, in its philosophical inspiration and consequences, wherever the neo-patriarchal regime of authority, values and truth is prevalent, ethical thinking cannot articulate today for pluralist civil society a single normative code of ethical ‘values’. This is the experience of many national ethics committees for the life sciences. I was a member of the French committee from 1990 to 1998 and I know how each member was very careful to not refer to his personal scale

intelektual oleh orang Eropa sendiri untuk mereka. Memiliki populasi petani sendiri Dan pekerja industri. Masyarakat terjajah sebenarnya lebih didasarkan pada sistem patriarki daripada hukum dan etika Islam. Itulah mengapa saya lebih suka berbicara tentang konteks Islam, atau yang disebut masyarakat Muslim untuk melepaskan diri dari kebingungan ideologis yang menyebar ke seluruh dunia kontemporer oleh wacana Muslim secara ‘obyektif’ (maksud saya dengan itu, tanpa kritik dekonstruktif) ditranskrip, Diberitakan oleh media dan bahkan sejumlah besar Sarjana terkenal. Kepribadian dan pemimpin Muslim yang sangat dihormati dan berpengaruh dirujuk Kebanggaan dan keyakinan terhadap spiritualitas dan etika Islam yang tidak berwujud, tanpa mempertimbangkan semua yang baru saja saya sebutkan Transformasi historis, sosiologis, dan ideologis dalam pemikiran Islam itu sendiri di satu sisi dan tantangan modernitas yang tak terbantahkan sebagai pergeseran mental, historis, di sisi lain. Posisi seperti itu berdasarkan keyakinan pribadi, atau membatasi tanggung jawab bagi mereka yang bertanggung jawab atas kepemimpinan agama, politik dan pendidikan, berkontribusi untuk mempertahankan ideologis, apologetik kebingungan dan, sebagai akibatnya, menunda kritik radikal yang tak terhindarkan terhadap nilai - baik spiritual atau etika - yang diperkenalkan oleh Nietzsche dalam Genealogy of Values-nya. Karena kritik ini diabaikan dan tidak terpikirkan, tentu saja, dalam inspirasi dan konsekuensi

of ethical values to share the consensus of the committee on the basic universal principle that the dignity of human person should take precedence in all the positions publicly declared in the name of the committee. This is the typical French laic approach to the issue of ethics in a pluralist society.

filosofisnya, di mana pun rezim otoritas, nilai, dan kebenaran neopatriarki lazim, pemikiran etis tidak dapat mengartikulasikan hari ini untuk masyarakat sipil pluralis satu kode normatif dari nilai-nilai etika'. Ini adalah pengalaman dari banyak komite etika nasional untuk ilmu hayat. Saya adalah anggota komite Prancis dari tahun 1990 hingga 1998 dan saya tahu bagaimana setiap anggota sangat berhati-hati untuk tidak mengacu pada skala pribadinya. Nilai-nilai etika untuk berbagi konsensus komite pada prinsip universal dasar bahwa martabat pribadi manusia harus didahulukan dalam semua posisi yang diumumkan secara publik atas nama komite. Ini adalah pendekatan laic Prancis yang khas terhadap masalah etika dalam masyarakat majemuk.

Contemporary Islam, heir to this tradition, further reinforced by the ideological strains resulting from their experience of modern history, resorted to the strategy of sanctifying classical, textual definitions of Islam, turning these effectively into the ultimate bedrock of legitimacy and authority for its own axioms and proclamations. It was this whole enterprise that I have consistently attempted to deconstruct, so as to push back the boundaries of what is intellectually possible to envisage in this area, and thereby to open new avenues of thought and investigation, not only for the Islamic tradition of thought, but most significantly for all other religious legacies and for the Western modern secularised Enlightenment. This means that my ambition is to embrace in the same intellectual gesture a radical critique of reason in all its productions,

Islam kontemporer, pewaris tradisi ini, yang selanjutnya diperkuat oleh aliran ideologis yang dihasilkan dari pengalaman sejarah modern mereka, menggunakan strategi pengudusan definisi klasik dan textual Islam, mengubahnya secara efektif menjadi landasan utama legitimasi dan otoritas untuk aksioma-aksioma mereka sendiri. Dan proklamasi. Seluruh usaha inilah yang secara konsisten saya coba dekonstruksi, untuk mendorong kembali batas-batasnya Apa yang secara intelektual mungkin untuk dibayangkan di bidang ini, dan dengan demikian membuka jalan baru pemikiran dan penyelidikan, tidak hanya untuk tradisi pemikiran Islam, tetapi yang paling signifikan untuk semua warisan agama lainnya dan untuk Pencerahan sekuler modern Barat. Ini berarti bahwa ambisi saya adalah

methodologies and epistemological postures.	merangkul dalam isyarat intelektual yang sama kritik radikal terhadap akal dalam semua produksi, metodologi dan postur epistemologisnya.
---	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

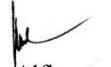
**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama	:	Medina Aulia Nurkasih
NIM	:	170101030041
Jurusan	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Konsep Etika Politik Arkoun dalam Perspektif Negara Demokratis
Pembimbing I	:	Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H. M.Hum.
Pembimbing II	:	Imam Alfiannor, M.HI.

<b>CATATAN PEMBIMBING I</b>	<b>CATATAN PEMBIMBING II</b>
<p>1. (Sabtu, 23 Januari 2021)</p> <p>Perbaikan yang perlu dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Footnote harus enter 1 kali</li> <li>2) Bagian data lainnya di poin data sekunder nomor 3 dimasukkan menjadi data tersier</li> </ul> <p></p> <p>2. (Senin, 25 Januari 2021)</p> <p>Perbaikan yang perlu dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam definisi operasional poin ketiga terkait definisi perspektif harus lebih dijelaskan perspektif yang bagaimana yang dimaksudkan oleh penulis dalam skripsi ini</li> <li>2) Bagian a dalam bab keempat dimasukkan saja ke dalam bab kedua</li> </ul> <p></p> <p>3. (Kamis, 28 Januari 2021)</p> <p>Perbaikan yang perlu dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pada bab keempat di halaman 15, siapa atau apa yang dimaksudkan lewat frasa kita. Mohon untuk diperjelas maksud dari frasa tersebut</li> </ul> <p></p>	<p>1. (Rabu, 3 Februari 2021)</p> <p>Perbaikan teknis yg perlu dilakukan yaitu teknik penulisan footnote. Kalimat footnote hendak nya berjarak satu spasi saja dan jarak antar footnote satu kali enter. Kemudian ada bbrp kata yg biasa dlm tulisan populer, seperti kata menggebrak, cari padanan katanya. Ada juga memulai kalimat dg kata kerja atau mendahulukan predikat. Ini juga keliru, Krn tdk sesuai kaidah kalimat baku (subyek-predikat-obyek/keterangan).</p> <p></p> <p>2. (Jum'at, 12 Februari 2021)</p> <p>Secara teknis penulisan yg harus diperbaiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) jarak antar footnote 1 kali enter</li> <li>2) jarak awal pengetikan utk setiap alinea baru minimal 7 ketukan dr sisi kiri paragraf.</li> <li>3) tidak perlu ada nomor untuk rumusan masalahnya karena hanya ada satu masalah</li> <li>4) demikian juga pada simpulan, tidak perlu ada nomor. Simpulannya dipersingkat, cukup dinyatakan bhw pemikiran arkoun itu sesuai dg ...., Kemudian kamu ungkapkan hal yg paling mendasar dr kesesuaian dimaksud. Buat simpulan sesederhana mungkin.</li> </ul>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

- |  |  |
|--|--|
| <p>4. (Senin, 1 Februari 2021)<br/>         Perbaikan yang perlu dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analisis terkait keterkaitannya dengan negara hukum dipertajam.<br/>                     Bagian simpulan diperbaiki.</li> </ol> <p style="text-align: center;"></p> | <br>Imam Alfiannoor |
|--|--|

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

### **CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama	:	Medina Aulia Nurkashih
NIM	:	170101030041
Jurusan	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Konsep Etika Politik Arkoun dalam Perspektif Negara Demokratis
Pembimbing I	:	Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H. M.Hum.
Pembimbing II	:	Imam Alfiannor, M.HI.

<b>CATATAN PEMBIMBING I</b>	<b>CATATAN PEMBIMBING II</b>
	<p>3. (Rabu, 17 Februari 2021)        Perbaikan yg perlu dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kata 'sehingga' pd alinea ketiga abstrak tidak benar di awal kalimat. Jadi hanya diberi tanda koma sebelum kata 'sehingga'.</li> <li>2) Bukti keaslian tulisan harus dibubuhinya materai 6000 dan tandatangan peneliti.</li> <li>3) Kamu tanyakan ke prodi bagaimana Nomenklatur nama prodi yg benar, seingat bapak tertulis 'Hukum Tatatanegara (Siyasah Syar'iyyah)"</li> <li>4) Tujuan pd alinea 2 abstrak hrs selaras dg rumusan masalah, demikian juga temuan penelitian pd alinea 4 abstrak hrs sama dg simpulan pd bab terakhir. Misalnya bhw pemikiran Arkoun itu sesuai dg ... berdasarkan argumentasi berikut ....</li> <li>5) Masih ada beberapa footnote yg diketik rapat atau tdk berjarak dg baris footnote berikutnya.</li> <li>6) Penulisan numbering abjad 'A. Latar Belakang' ditulis di sisi kiri margin.</li> </ul> <p style="text-align: right;">_____ Imam Alfiannoor</p>
	<p>4. (Senin, 21 Februari 2021)        Perbaikan yang perlu dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pd abstrak alinea terakhir harus konsisten dengan tujuan penelitian. Jadi setelah menegaskan sejalan atau</li> </ul>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

sesuai, maka kalimat selanjutnya berisi ttg poin2 argumentasi dari kesesuaian dimaksud.

- 2) Demikian juga pd bab penutup. Simpulannya masih berupa analisa. Semestinya cukup kalimat yg menyatakan kesesuaian, setelah dilanjutkan dg poin2 argumentasi peneliti thdp kesesuaian dimaksud. Misalnya si A itu berjodoh dg si B karena sama2 pinter, sama2 bungas, dst.
- 3) Pengetikan huruf A. Simpulan agar diketik di sisi margin kiri, bukan diketik menjorok ke dalam. Demikian juga huruf B. Saran.

  
Imam Alfianoor



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- **99** /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	:	Medina Aulia Nurkashih
NIM	:	170101030041
Program/Jurusan	:	S.1 / HTn (Siyasah Syar'iyyah)
Judul	:	Konsep Etika Politik Arkoun Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	:	Dr. Hj. Hayatun Na'imah, SH, M.Hum
Pembimbing II	:	Imam Alfianor, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 1101 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2020 Banjarmasin, 17/07/2020  
 Lamp. : 1 naskah proposal  
 Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
 Medina Aulia Nurkasih / 170101030041  
 di  
 Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 16/07/2020, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM	:	Medina Aulia Nurkasih / 170101030041
Jurusan	:	HTn (Siyasah Syar'iyyah)
Judul	:	Konsep Etika Politik Arkoun dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis

Hari/Tanggal	:	Monday, 20 July 2020
Waktu	:	09.00 - 11.00
Tempat	:	Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Pembimbing II	:	Imam Alfiannor, MHI
Moderator	:	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK
Pembahas Utama I	:	Abdul Rahman Sayuti /
Pembahas Utama II	:	Efha Maulana /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Catatan:  
 Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk  
 menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 95



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN  
 Nomor: B- 116 /Un.14/III.2/PP.00.9/07/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	:	Medina Aulia Nurkasih
NIM	:	170101030041
Jurusan	:	HTn (Siyasah Syar'iyyah)
Judul	:	Konsep Etika Politik Arkoun dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal	:	Monday, 20 July 2020
Waktu	:	09.00 - 11.00
Tempat	:	Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	:	Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Pembimbing II	:	Imam Alfiannor, MHI
Moderator	:	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Pembahas Utama I	:	Aulia Agustina /
Pembahas Utama II	:	Efha Maulana /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 July 2020



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 95



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- **654** /Un.14/II.2/PP.00.9/3/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Medina Aulia Nurkashih  
NIM : 170101030041  
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 November 2020  
Waktu : 13.30 - 15.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khayy'in, Lc, MA  
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk  
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 88,3 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 10 Maret 2021



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 130



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 667/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**Medina Aulia Nurkasih**

**NIM : 170101030041**

Kelahiran Banjarmasin, 15 Juli 2001

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 12 Maret 2021

Dekan,



**Dr. H. Jalaluddin, M.Hum**  
**NIP.19661126 199102 1 002**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### **NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Medina Aulia Nurkasih  
 NIM : 170101030041  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Semester : 7  
 Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	-	-	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	31	96	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	-	-	
2.	Aspek Penunjang: a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	-	-	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	-	-	
<b>JUMLAH</b>		31	96	

Banjarmasin, 10 Agustus 2020

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197011131998032004



Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum  
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## **RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Medina Aulia Nurkasih
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Juli 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. A. Yani Km. 5,7 Gang Bakula No. 513D
7. Pendidikan
  - a. SD Muhammadiyah 08 – 10 Banjarmasin
  - b. SMPN 6 Banjarmasin
  - c. SMAN 1 Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : Tidak Ada
9. Orang Tua
  - a. Ayah : Rudy Indrawan
  - b. Ibu : Sartati
10. Saudara : 1 (Satu)